

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, negara Republik Indonesia belum memiliki badan pemerintahan dan militer. Walaupun demikian, para pemimpin di Jakarta saat itu sudah memikirkan dan membuat pelbagai konsep pemerintahan, hal ini terkait dengan lembaga yang menjadi alat menjalankan roda pemerintahan.<sup>1</sup> Masalah utama pada awal proklamasi adalah pemerintahan yang masih terlihat lemah. Adanya aparat pemerintahan dan militer juga tidak begitu memperkuat kondisi saat itu karena perlengkapan yang kurang memadai, baik administrasi dan militer. Badan pemerintahan yang sudah dibentuk di berbagai daerah juga belum mampu mengendalikan situasi masyarakat. Proses revolusi kemerdekaan sendiri tidak berlangsung serentak di semua wilayah Hindia Belanda, awalnya hanya meliputi Sumatera dan Jawa. Baru kemudian secara perlahan, merebak ke wilayah lain yang merupakan bekas jajahan Hindia Belanda.<sup>2</sup> Selain itu, balatentara Jepang juga masih menganggap diri sebagai penguasa dan bersiaga penuh, menunggu instruksi dari Sekutu<sup>3</sup>. Situasi di negara yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya berjalan tidak menentu, itulah gambaran awal Republik Indonesia.

---

<sup>1</sup>Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm 158-163. Baca juga Mestika Zed, *Giyûgun, Cikal Bakal Tentara Nasional di Sumatera* (Jakarta: LP3ES, 2005)

<sup>2</sup> Marwati, *ibid.*,

<sup>3</sup>Mestika Zed, *Giyûgun, Cikal-bakal Tentara Nasional di Sumatera*, (Jakarta: LP3ES, 2005), hlm 113.

Situasi tidak jauh berbeda juga terjadi di Sumatera menghadapi revolusi kemerdekaan. Para pemimpin di Sumatera kesulitan dalam hal komunikasi. Komunikasi antara pemimpin di Jawa dan Sumatera hampir putus, begitu pula antar daerah di Sumatera. Ini merupakan dampak politik isolasi Jepang yang diterapkan di Sumatera.<sup>4</sup> Kondisi yang demikian memperparah keadaan masyarakat Sumatera di awal kemerdekaan. Saat sebelum penaklukan Sekutu, Jepang mengobrol berbagai jenis barang milik mereka. Hanya saja masih banyak barang yang sulit didapat seperti bahan bakar. Jepang menutup sejumlah kantor dan meliburkan pegawainya yang orang Indonesia. Radio Sumatera (*Sumatra Hosokyoku*) di Bukittinggi dilarang memancarkan siaran, *Domei* juga mendadak menghentikan kegiatannya. Kantor berita itu disegel pada tanggal 14 Agustus 1945. Kapal-kapal Jepang yang ditugaskan mengawasi perairan, mulai menghilang dan juga tidak terlihat tentara Jepang yang berlatih.<sup>5</sup> Semua karyawan dilarang bekerja dan diperintahkan pulang ke kediaman masing-masing.

Peristiwa yang lebih parah terjadi di barak dan asrama *Gyûgun* Sumatera, mereka dibubarkan secara mendadak.<sup>6</sup> Para anggota *Gyûgun* merasa bingung dengan situasi yang terjadi. Sebagian merasa kehilangan tujuan hidup, karena merasa *Gyûgun* adalah karirnya. Sebagian merasa diterlantarkan dan ditinggalkan begitu saja. Secara tiba-tiba, mereka menjadi orang tidak berguna. Sebagai anggota “terpilih”, mereka dilatih, dididik dalam hal organisasi dan militer Jepang. Mereka diberi pelayanan istimewa, selalu ada pujian atas kerja keras mereka. Ada suatu nuansa baru yang menjadi semangat para anggota *Gyûgun* saat itu. Mereka dicampakkan begitu saja oleh Jepang, diusir pulang dari barak dan

---

<sup>4</sup> G. Moedjanto, *Indonesia Abad Ke- 20, Jilid 1*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm 93.

<sup>5</sup>Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, *Sejarah Nasional Daerah Kota Bengkulu*, (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1984), hlm. 119.

<sup>6</sup> Kementerian Penerangan, *Propinsi Sumatera Tengah* (Djakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia, 1954), hlm. 54. Haji Abdullah Siddik, *Sejarah Bengkulu 1500-1990*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 135

asramanya. Nasib ini dirasakan oleh semua anggota *Gyûgun*, mereka harus pulang kembali ke kampung halaman masing-masing.<sup>7</sup>

Beberapa orang bekas perwira *Gyûgun* mengumpulkan kembali anak buahnya yang tersebar di berbagai tempat. Satu dari perwira tersebut adalah Ismael Lengah, perwira *Gyûgun* paling senior di Sumatera Barat. Ismael Lengah juga yang meyakinkan teman-temannya bahwa dia sudah mendengar berita kekalahan Jepang dari pemuda Cina yang dijumpainya dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya.<sup>8</sup> Ismael dan teman-temannya berkumpul di salah satu warung kopi di Kota Padang sambil mendengarkan *radio lutik*.<sup>9</sup> Mereka sepakat untuk membentuk sebuah badan yang menjadi wadah perjuangan rakyat Sumatera Barat.<sup>10</sup> Ismael Lengah mengusulkan nama untuk badan perjuangan tersebut, “Balai Penerangan Pemuda Indonesia” (BPPI). Tugas utamanya adalah menampung segala persoalan dan memberi penerangan kepada siapa yang bertanya tentang Proklamasi Kemerdekaan. Balai ini terbentuk tanggal 19 Agustus 1945.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup>Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Bengkulu*, (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1983), hlm. 97. Lihat juga Mestika Zed, *Giyûgun, Cikal-bakal Tentara Nasional di Sumatera*, (Jakarta: LP3ES, 2005), hlm 114.

<sup>8</sup>Mestika Zed, *loc.cit.*, hlm. 116.

<sup>9</sup>Radio lutik (dalam bahasa Minang), lutik artinya lutut. Jadi maksudnya, berita yang disampaikan dari mulut ke mulut sambil duduk berjongkok.

<sup>10</sup>Chatib Soelaeman kurang lebih mengatakan, “Rakyat mungkin bingung dengan keadaan kita sekarang. harus ada gerakan untuk mendukung proklamasi, sekaligus menghilangkan keraguan-raguan rakyat”. Inyik Basa Handaro menyambung perkataan Chatib Solaeman dengan mengatakn “Tentu di sana (Jawa) orang sudah bergolak, malu kita terhadap orang-orang di Jawa.”, Mestika, *ibid.*,

<sup>11</sup>Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *loc.cit.*, hlm 170.

Anggota BKR Padang berasal dari *Gyûgun*. Keduanya, BPPI dan BKR, menjalankan fungsi saling melengkapi. Organisasi pemuda lainnya yang cukup penting di Sumatera Barat adalah “Pemuda Indonesia” (PI) yang kemudian berubah nama menjadi “Pemuda Republik Indonesia” (PRI). Organisasi itu dibentuk di Bukittinggi dengan tujuan dan tugas hampir sama dengan BPPI Padang, yakni pendidikan politik massa, menyebarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan dan menghimbau rakyat untuk membantu perjuangan melawan musuh. Berbeda dengan BKR dan BPPI, pemuda mendominasi keanggotaan PRI.<sup>12</sup> Ismael Lengah dibantu oleh beberapa orang kawan menghimbau sekaligus merekrut bekas *Gyûgun* untuk dimasukkan ke dalam wadah BKR Padang. komandannya adalah Jazid Abidin. Dari Padang BKR menyebar hingga Riau.

Kegiatan serupa juga berlangsung di beberapa wilayah di Sumatera, yang dipelopori oleh mantan *Gyûgun*. Misalnya di Medan. Selang beberapa waktu, Selamat Gintings, mantan perwira *Gyûgun* dan kawan-kawan merekrut bekas *Gyûgun* dan pengawas “Badan Oentoek Membantoe Pertahanan Asia” (BOMPA). Terbentuklah “Barisan Pemuda Indonesia” (BPI) pada 23 September 1945, yang fungsinya tidak jauh berbeda dengan BPPI di Padang. Sugondo Kartoprodjo menjadi Ketua Umum, Ahmad Tahir menjadi Ketua 1. Mayoritas BPI adalah mantan *Gyûgun*. Organisasi militer yang kemudian terbentuk di daerah itu tidak melalui BKR, tetapi langsung meloncat dari organisasi pemuda menjadi TKR lokal. Pada masa revolusi 1945-1949 Keresidenan Sumatera Barat yang telah menjadi bagian Sumatera Tengah berperan menyelamatkan kedaulatan Republik Indonesia yang masih belia.

Di Kota Bengkulu beberapa orang bekas perwira *Gyûgun* mengadakan pertemuan dengan beberapa anak buahnya yang masih bisa dihubungi. Pertemuan itu berlangsung tanggal 7 September 1945 di sebuah rumah, dekat Masjid Jami (sekarang Jalan Let. Jen. Suprpto No. 22 Bengkulu). A. Rusdi, menjadi pemimpin pertemuan yang terkesan sembunyi-sembunyi, karena ada beberapa petugas (mereka adalah orang yang masih setia dengan Jepang) mengintip dan

---

<sup>12</sup>Mestika Zed, *loc.cit.*, hlm 117-118.

menguping pembicaraan. Pertemuan ini juga dihadiri Umar Said dan Cipto<sup>13</sup> dari Palembang, mereka menjelaskan segala sesuatu yang berlangsung di sana. Hasil dari pertemuan tersebut adalah segera menghubungi para bekas *Gyûgun* dan *Heiho* lainnya untuk membentuk barisan bersenjata dan mengadakan pertemuan kembali untuk membentuk barisan tersebut tanggal 10 September 1945. Pertemuan tersebut dilaksanakan di kediaman Nawawi Manaf di Jalan Pintu Batu. Mereka yang hadir dalam pertemuan tersebut sepakat membentuk sebuah organisasi yang bernama “Barisan Pemuda Indonesia” (BPI). BPI diketuai Nawawi Manaf, dengan wakil ketua M. Z. Ranni dan Sekretaris Hadis Lani, mereka adalah mantan *Gyûgun* di Karesidenan Bengkulu. Anggota BPI tidak para mantan *Gyûgun* tapi juga para pemuda antara lain Badrun, Umar Kader, Rivai Aris dan Inuh Mustafa.<sup>14</sup>

Aktivitas di Bengkulu tidak jauh berbeda dengan karesidenan lainnya. Ketika terbentuk organisasi yang belum bisa dikatakan badan perjuangan bersenjata, maka dilakukan pertemuan besar. Pertemuan tersebut bertujuan membentuk sebuah badan perjuangan bersenjata. Pada awal Perang Pasific ada sebuah organisasi pemuda dan mendominasi Karesidenan Bengkulu bernama “Pemuda Angkatan Baru” (PAB). Organisasi berinisiatif untuk membentuk badan militer tersebut dengan mengadakan pertemuan di sebuah rumah di Pasar Tebek. Hasil pertemuan tersebut adalah membagi tugas para pemuda.<sup>15</sup> Sebagian dimasukkan menjadi anggota “Penjaga Keselamatan Rakyat” (PKR) yang diketuai

---

<sup>13</sup>Umar Said dan Cipto bisa jadi adalah bekas *Gyûgun* Karesidenan Palembang, karena dalam bukunya, Ranni tidak menjelaskan siapa mereka. Baca M. Z. Ranni, *Perlawanan Terhadap Penjajahan dan Perjuangan Menegakkan Kemerdekaan Indonesia di Bumi Bengkulu*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 49.

<sup>14</sup>Ranni, *Ibid.*, hlm. 51

<sup>15</sup>PAB adalah organisasi besar yang beranggotakan para pemuda Bengkulu. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk menghindari pecahnya para pemuda Bengkulu karena munculnya organisasi daerah di awal kemerdekaan.

Nawawi Manaf dan sebagian lagi menjadi anggota “Pemuda Republik Indonesia” (PRI) yang diketuai Maurice Umar.<sup>16</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana situasi Sumatera Barat dan Bengkulu menjelang kemerdekaan?
2. Bagaimana Revolusi Fisik di Sumatera Barat?
3. Bagaimana Revolusi Fisik di Bengkulu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Kegiatan penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Arti penelitian sendiri ialah usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, dengan menggunakan metode-metode penelitian<sup>17</sup>.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui gambaran umum keadaan Sumatera Barat dan Bengkulu menjelang kemerdekaan.
- b. Mengetahui Revolusi Fisik di Sumatera Barat pada awal kemerdekaan.
- c. Mengetahui Revolusi Fisik di Bengkulu pada awal kemerdekaan.

## **D. Manfaat Penelitian**

- a. Mengetahui gambaran situasi Sumatera Barat dan Bengkulu menjelang kemerdekaan.
- b. Memberikan pengetahuan tentang Revolusi Fisik di Sumatera Barat.
- c. Memberikan pengetahuan tentang Revolusi Fisik di Bengkulu.

---

<sup>16</sup>Ranni, *Ibid.*, hlm 53.

<sup>17</sup>Soetrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), hlm. 4.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan variabel yang menentukan dalam suatu penelitian<sup>18</sup>. Pengertian kajian pustaka pada umumnya adalah ringkasan atau rangkuman dan teori yang ditemukan dari sumber bacaan (literatur) yang mempunyai keterkaitan tema dalam penelitian yang dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengorganisir hasil penemuan yang telah dilakukan. Hal ini penting untuk memahami mengapa masalah atau tema tersebut diangkat. Sederhanya, kajian pustaka menjadi landasan pemikiran dalam penelitian.

Peristiwa lokal seperti perjuangan kemerdekaan di daerah Sumatera tidak banyak diketahui kalangan akademis, karena sedikitnya kajian dan sulitnya menemukan sumber primer. Pengkajian dan penelitian peristiwa daerah, khususnya di Sumatera, tidak bisa lepas dari peristiwa nasional. Contohnya masa pemerintahan pendudukan Jepang di wilayah Hindia Belanda. Ada banyak peristiwa yang terjadi di Sumatera, sebut saja pembentukan *Gyûgun* dan peranannya pada masa pendudukan Jepang. Kalangan akademis banyak mengkaji PETA ketimbang *Gyûgun*, padahal *Gyûgun* mempunyai peranan penting masa itu. Banyak peristiwa menarik di Sumatera yang tidak kalah menarik untuk dikaji semasa pendudukan Jepang selain PETA dan kehidupan sosial ekonomi di Jawa.<sup>19</sup> Pemilihan proses-proses historis yang umum dan aliran pokok tergantung dari sudut penglihatan, interpretasi yang dipakai dalam sejarah nasional<sup>20</sup>.

Pemerintah Indonesia menyatukan Sumatera menjadi satu propinsi. Tetapi muncul permasalahan di kalangan elit Keresidenan Sumatera Barat, karena wilayah Sumatera yang terlalu luas, kerja Gubernur Sumatera dianggap para Residen tidak dapat maksimal. Alasan para petinggi keresidenan itu antara lain, Gubernur mempunyai berbagai keterbatasan dan persoalan yang dihadapi

---

<sup>18</sup>Refrensimakalah.com, 26 Januari 2013, 12.03 am, Pengertian dan Tujuan Kajian Pustaka.

<sup>20</sup>Sartono Kartodirjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*, (Jakarta: Gramedia 1982), hlm 34-36.

daerahnya sangat banyak. Untuk mengatasi kendala tersebut maka diadakanlah rapat di Bukittinggi tanggal 17 April 1946, sebagai musyawarah mencari jalan keluar terkait luas wilayah kerja Gubernur. Akhirnya muncullah isu-isu otonomi dan desentralisasi tahun 1948 yang membuat pemerintah pusat merestui untuk membagi Sumatera menjadi tiga daerah sub-propinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Gubernur Muda. Ketiga daerah sub-propinsi itu adalah Sumatera Utara yang meliputi Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli; Sumatera Tengah yang meliputi Karesidenan Sumatera Barat, Riau dan Jambi; serta Sumatera Selatan yang meliputi Karesidenan Palembang, Bengkulu, Lampung dan Bangka-Belitung.<sup>21</sup>

Sejarah nasional adalah perspektif nasional, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sejarah lokal dipandang sebagai bagian dari sejarah nasional, tiap peristiwa diinterpretasikan dalam hubungannya dengan peristiwa dari sejarah nasional. Banyaknya badan perjuangan yang lebih dulu terbentuk sebelum BKR, menjadi bukti adanya sejarah lokal. PKR adalah contoh badan berbasis militer dan merupakan sejarah lokal Bengkulu. Perjuangan mereka tidak hanya menembaki musuh tapi juga meyakinkan rakyat tentang kemerdekaan sepenuhnya. Perjuangan mereka diinterpretasikan sebagai perjuangan mempertahankan kemerdekaan di daerah. Perspektif nasionalnya adalah perjuangan awal kemerdekaan di Indonesia.

PKR sejatinya lahir dari hasil perundingan, peleburan dari beberapa badan perjuangan. Sampai BKR secara resmi ada di Bengkulu, PKR menjadi badan keselamatan dan perjuangan. Dari hasil perundingan Organisasi Pemuda Angkatan Baru, PKR lahir. Perundingan tersebut menyarankan bahwa masyarakat perlu badan organisasi yang harus menjaga keamanan rakyat, menyatukan kekuatan sebagai negara yang merdeka.

---

<sup>21</sup> Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 15.



Penulisan karya tulis ini tidak lepas dari tulisan M. Z. Ranni yang berjudul *Perlawanan terhadap Penjajahan dan Perjuangan Menegakkan Kemerdekaan Indonesia di Bumi Bengkulu*<sup>22</sup>. M. Z. Ranni adalah anggota TKR pada masanya dan juga tergabung dalam PKR sebelumnya. Perlawanan daerah yang dilakukan dari masa ke masa adalah kajian penting dalam buku ini. Ranni membagi perjuangan setelah kemerdekaan di Bengkulu menjadi lima periode. PKR masuk dalam periode pertama perjuangan kemerdekaan di Bengkulu.

Proyek IDKD juga menerbitkan buku terkait perjuangan imperialisme di Bengkulu, *Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di daerah Bengkulu*<sup>23</sup>. Pengkajian buku ini lebih kepada perjuangan saat masa kolonial dan saat BKR mulai terbentuk. Namun bisa dijadikan kajian terkait keadaan Bengkulu menjelang akhir kekuasaan Jepang sampai awal tahun 1950. Beberapa naskah terkait penyerahan kekuasaan dari Inggris ke tangan Belanda dan peta Bengkulu tahun 1945-1949. Peta ini menjelaskan wilayah yang menjadi pusat pemerintahan militer dan wilayah-wilayah cabang PKR pada awal kemerdekaan.

## **F. Historiografi yang Relevan**

Historiografi menurut Louis Gottschalk adalah proses rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses pengujian dan menganalisa secara kritis rekaman serta peninggalan masa lampau<sup>24</sup>. Atas dasar ini, maka historiografi yang relevan penting untuk mengetahui karya penulis adalah murni karya sendiri. Plagiat di masa kini menjadi alasan lain perlunya historiografi yang relevan. Karya tulis lain dengan

---

<sup>22</sup>M. Z. Ranni, *Perlawanan terhadap Penjajahan dan Perjuangan Menegakkan Kemerdekaan Indonesia di Bumi Bengkulu*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

<sup>23</sup>Proyek IDKD Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di daerah Bengkulu*, (Jakarta: Proyek IDKD Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983/984)

<sup>24</sup>Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, diterj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 1989), hlm. 32.

tinjauan yang sama bisa terjadi, namun terletak perbedaan dari objek penelitiannya.

Mestika Zed menguraikan *Gyûgun* di Sumatera sebagai cikal bakal tentara nasional di Sumatera. Identitas formal tentara Indonesia muncul pada masa Revolusi 1945-1950. Peran dan pengalaman mereka yang pernah mengikuti pelatihan militer semasa pendudukan Jepang di Sumatera cenderung diabaikan. Melalui tulisannya, Mestika mengkaji tentang *Gyûgun* di beberapa karesidenan di Sumatera.

Rezim pendudukan Jepang, selain banyak memberi pengalaman cukup berharga, terkhusus di bidang militer. Pelatihan atau keterampilan militer para pemuda di sebagian kawasan Asia Tenggara diperoleh pada masa itu. Mereka dilatih untuk lebih percaya diri dan bangga menjadi orang Asia. Motif utama pelatihan dan pendidikan di bidang militer itu adalah untuk mengantisipasi serangan musuh (Sekutu) sekaligus memenangkan perang. Program *Gyûgun* menghasilkan elite militer yang akhirnya sulit dikontrol, bahkan menjadi boomerang terhadap pemerintah pendudukan Jepang.

Sebagai organisasi profesi militer pertama di Sumatera, *Gyûgun* sama dengan organisasi militer profesional yang memiliki standar kualitatif berbeda dengan PETA. Dua variable terpenting dalam itu adalah pengawasan dan kecakapan khas ciptaan Jepang. Pelatihannya terkontrol sesuai dengan instruksi Jepang. Mereka dibentuk menjadi calon-calon perwira yang harus memelihara keserasian korps perwira sebagai kelompok profesi dan sosial. Mereka dituntut disiplin sesuai dengan jenjang pangkat dan wewenangnya.

Mestika berupaya menemukan dua masalah terkait *Gyûgun*. Bagaimana struktur sosial dan mobilitas sosial, ini terkait konsep peran dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan perubahan structural dalam lintas-waktu dan perubahan-perubahan spesifik kelompok status elite, pemeang gelar, asosiasi profesional, birokrasi dan kelas ekonomi. Kemudian apa yang menjadi motif dan kepentingan yang mendasar terkait sejarah setempat (*Gyûgun* di tiap karesidenan). Akhirnya didapatkan gambaran secara keseluruhan tentang jajaran perwira *Gyûgun* di Sumatera khususnya dan retang karier militer mereka pada umumnya.

Tulisannya membahas kebijakan pemerintah militer Jepang di Sumatera yang berbeda sekali dengan kebijakan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa. Dia juga menjelaskan pola rekrutmen dan profil beberapa perwira *Gyûgun* di Sumatera. Bengkulu yang berdiri sebagai karesidenan sendiri juga dibahas dalam tulisannya. Walaupun tidak mendapat porsi yang besar, namun memberi gambaran kegiatan *Gyûgun* dan pengaruhnya kemudian setelah kemerdekaan.

### **G. Metode Penelitian**

Sejarah sebagai suatu ilmu merupakan suatu rekonstruksi masa lalu yang terikat pada prosedur penelitian sejarah<sup>25</sup> (metode penelitian sejarah). Metode yang bercorak kesejarahan menurut Lueey<sup>26</sup> adalah suatu sistem aturan dan prosedur untuk mengumpulkansaksi atau kesaksian dari suatu masa atau peristiwa, mengevaluasi saksi atau kesaksian tersebut, untuk menyusun fakta-fakta yang terbukti memiliki hubungan kausal, dan akhirnya menghadirkan atau menyajikannya dalam suatu uraian yang bersifat ilmiah.

Pengertian lebih khusus, sebagaimana dikemukakan Garraghan<sup>27</sup>, bahwa Metode Penelitian Sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Senada dengan pengertian ini, Louis Gottchalk<sup>28</sup> menjelaskan, bahwa metode sejarah adalah sebagai proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah guna

---

<sup>25</sup>Kuntowijoyo, (1999), *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang, hlm. 12

<sup>26</sup>William Leo Lueey, (1958), *History: Method and Interpretation*, Chicago: Layola University Press, hlm. 27-28.

<sup>27</sup>Gilbert J. Garraghan, S.J., (1957), *A Guide Historical Method*, New York. Fordham University Press, hlm. 33.

<sup>28</sup>Louis Gottschalk, *loc.cit.*

menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya, serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya.

Ada beberapa langkah yang akan dijalankan dalam penelitian ini, yaitu pengumpulan sumber (heuristik), melakukan kritik atas sumber, kemudian diinterpretasi yang selanjutnya diperoleh fakta-fakta sejarah. Dari fakta-fakta inilah kemudian diadakan perangkaian atas fakta satu dengan fakta lainnya yang didukung dengan data-data yang kuat sehingga menghasilkan cerita sejarah.<sup>29</sup>

### **1. Heuristik**

Heuristik adalah langkah pelacakan sumber. Dalam hal ini perlu diingat apa yang dikatakan Kutowijoyo<sup>30</sup>, bahwa kebenaran sejarah terletak dalam kesediaan sejarawan untuk meneliti sumber sejarah secara tuntas, sehingga diharapkan akan dapat mengungkap sejarah secara tuntas. Oleh karena itu, pada tahap ini peneliti mencari data sebanyak-banyaknya, baik yang langsung mengenai objek penelitian ataupun tidak, dan baik yang mendukung asumsi penelitian ataupun tidak. Dengan teknik seperti ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang sebanyak-banyaknya, sehingga dalam interpretasi nanti dapat diperoleh fakta. Sementara itu, data-data yang terkait dengan penelitian ini dapat diperoleh baik melalui studi pustaka yang berbentuk buku-buku, majalah, dan jurnal, media masa, maupun media elektronik, seperti internet.

### **2. Kritik Sumber**

Dalam penelitian sejarah dikenal, bahwa dalam penyeleksian sumber perlu diadakan kritik eksteren yang berkaitan dengan otentisitas atau keaslian sumber, sehingga sumber tersebut dapat dipercaya keasliannya dan kritik internal yang berkaitan dengan kredibilitas sumber atau kebenaran isi sumber tersebut. Praktiknya, kritik interen dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan sejumlah sumber mengenai substansi persoalan yang sama, dan mengamati kaitan ilmiahnya dengan terminologi-terminologi konseptual yang tersedia. Selanjutnya,

---

<sup>29</sup> Kuntowijoyo, *op. cit.*, hlm. 94-103.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

untuk memudahkan kerja interpretasi, tahap seleksi dilakukan dengan menggunakan teknik reduksi data. Dalam reduksi data ini, peneliti melakukan klasifikasi data dan fakta yang relevan dengan objek penelitian serta menyisihkan sementara data dan fakta yang tidak relevan dengan objek yang dikaji.

### **3. Interpretasi**

Dalam praktiknya, setelah data diperoleh dari beberapa sumber yang tersedia, maka dilakukanlah analisis terhadap data yang telah terkumpul, diklasifikasikan, dicari hubungannya dan kemudian disimpulkan berdasarkan dalil-dalil logika dan konstruksi teoritis. Adapun dalam proses analisis ini dilakukanlah reduksi dari data yang telah terkumpul, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan pola kajian ini. Selanjutnya, agar mempermudah dalam proses penyimpulan, maka dalam proses analisis dilakukanlah display data. Dalam display data yang dilakukan adalah membuat kategorisasi, mengelompokkan dalam kategori-kategori tertentu, membuat klasifikasi dan menyusunnya dalam suatu sistem sesuai dengan peta masalah penelitian ini.<sup>31</sup>

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode interpretasi. Penafsiran atau interpretasi dapat berarti memperantarai pesan yang secara eksplisit dan implisit termuat dalam realitas. Makna yang terkandung dalam realitas dirumuskan dan berupaya mengubah hal yang terselubung dalam bahasa atau simbol lainnya, sehingga makna yang terkandung menjadi dapat dipahami. Sementara itu, proses memperantarai dan menyampaikan pesan agar dapat dipahami mencakup tiga pengertian yaitu: pengungkapan, menerangkan, dan menerjemahkan.<sup>32</sup> Interpretasi dapat pula berarti analisis dan sintesis. Analisis

---

<sup>31</sup> Kaelan,(2010), *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paradigma, hlm.167-170.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 169-173.

berarti menguraikan dan sintesis berarti menyatukan data-data yang diperoleh.<sup>33</sup> Dari analisis inilah diperoleh fakta-fakta sejarah.

#### 4. Historiografi

Historiografi merupakan tahap yang terakhir, yaitu berupa penulisan sejarah. Dalam tahap penulisan ini disusun sesuai dengan alur berpikir peneliti dan pilihan peneliti untuk menguraikan pembahasan secara kronologis. Tentu saja, bahwa dalam tahap penulisan ini tidak terlepas rekonstruksi yang imajinatif. Intinya, bahwa pada tahap ini peneliti mengorganisasikan dan mengemukakan penemuan-penemuannya dalam bentuk karya sejarah.

Pendekatan berguna untuk mengungkapkan atau menganalisa suatu peristiwa dengan menggunakan teori dan konsep dari disiplin-disiplin ilmu lain. Pendekatan menjadi hal yang penting sebab dari sini, didapatkan sudut pandang tertentu dan menghasilkan kejadian tertentu<sup>34</sup>. Penelitian sejarah tidak lepas dari ilmu sosial lainnya. Ilmu-ilmu sosial yang menjadi ilmu bantu sebagai pendekatan dalam mengungkap setiap sisi peristiwa sejarah. Pendekatan menurut satu garis penelitian menjadi terlalu subjektif dan keterangannya terlalu sederhana untuk mencakup suatu kehidupan historis yang kompleks<sup>35</sup>. Ini menjadi alasan perlunya menggunakan lebih dari satu ilmu bantu untuk membentuk keterangan suatu kehidupan historis yang kompleks.

Politik sejatinya adalah sejarah masa kini dan sejarah adalah politik masa lampau<sup>36</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah diindetikan dengan politik,. Maka pendekatan politik adalah segala usaha tindakan atau suatu kegiatan manusia

---

<sup>33</sup>Kuntowijoyo, *Pengantar..... op. cit*, hlm. 100-102.

<sup>34</sup>Suhartono W. Pranoto, *Loc. cit.*,

<sup>35</sup>Sartono Kartodirjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*, ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1982), hlm 40.

<sup>36</sup>Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial : Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm 331.

dalam kaitannya dengan kekuasaan suatu negara yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat<sup>37</sup>. Selama sejarah dan politik berjalan seiringan, maka selalu ada tokoh, interkasinya dan peranannya dalam suatu peristiwa. PKR menjadi bentuk politik untuk menunjukkan siapa yang berkuasa, siapa yang dipengaruhi dan siapa menaklukan siapa. Kekuasaan yang diperebutkan antara putra daerah dengan elite Jepang dan Hindia Belanda yang masih bertahan saat itu. Perebutan kekuasaan dan pengaruh seorang tokoh itulah yang hendak ditinjau melalui pendekatan politik.

Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang menyelidiki persoalan-persoalan umum di dalam masyarakat dengan maksud untuk menemukan dan menafsirkan kenyataan-kenyataan kehidupan masyarakat atau memahami kekuatan dasar yang berada di belakang tata kelakuan sosial<sup>38</sup>. Thame menyatakan bahwa sejarah sosial mencakup kehidupan sehari-hari penghuni sebuah kawasan di masa lampau, meliputi manusia dan hubungan dari berbagai kelas, sikap manusia terhadap alam, budaya dari tiap masa. Kehidupan manusia terkait kondisi umum dalam bidang agama, literatur, arsitektur, pembelajaran dan pemikiran<sup>39</sup>. Keadaan rakyat pada awal kemerdekaan menjadi topik yang dikaji dengan segala kondisi umum saat itu. Aktifitas rakyat untuk melakukan perjuangan dan perubahan struktur masyarakat memberi gambaran berbeda dari masa sebelumnya. Perlunya pendekatan sosial untuk melihat perubahan aktifitas rakyat saat PKR menjadi kekuatan militer di awal kemerdekaan di Bengkulu.

Militer secara konvensional bertugas untuk menegakkan kedaulatan negara maupun masyarakat dari serangan lawan atau kadang menjadi alat untuk

---

<sup>37</sup>Sartono Kartodirjo, *Op.cit.*, hlm. 40.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm 5

<sup>39</sup>Thame, Pat, *Sejarah Sosial dalam Adam Kuper dan Jessica Kuper. Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*, diterj. Harris Munandar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 983.

melakukan aneksasi ke negara atau masyarakat lain ataupun keperluan lain sejenisnya. Militer digunakan sebagai alat untuk memenangkan peperangan bersenjata dimana dibutuhkan perintah dan kewenangan sentral dan efektif untuk menggerakkan seluruh kesatuan tempur yang berbeda-beda untuk satu tujuan<sup>40</sup>. Karya sejarah pada awalnya bertemakan militer, baik perang, taktik perang dan sang penguasa. Militer menjadi alat untuk mencapai satu tujuan. Penulis sejarah Yunani yang terkenal adalah Herodotus (198-117 SM) menulis karya yang berjudul *History of the Persian War* (Sejarah Perang Persia 500-479 SM)<sup>41</sup>. Peperangan antara Yunani dan Persia di Laut Aegea adalah satu dari banyak karya tentang peperangan di Yunani. Taktik perang dan alat perang menjadi alat dengan tujuan adalah mengalahkan dan menguasai. sejatinya militer adalah alat untuk menuju kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. PKR harus dilihat dari sisi militer untuk mengetahui taktik perang yang dipakai melawan Jepang dan Hindia Belanda. Penguasaan wilayah dan alat perang yang digunakan menentukan tingkat keberhasilan dalam pertempuran. Tujuannya adalah untuk mengusir Jepang dan Hindia Belanda dan mempertahankan kemerdekaan.

---

<sup>40</sup>Dwi Pratomo Yulianto, *Militer dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Narasi, 2005), hlm.71.

<sup>41</sup>Dadang Supardan, *Loc.cit.*, hlm 313.